

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2016, seluruh mata tertuju pada referendum yang dilakukan Inggris mengenai status mereka di Uni Eropa. Latar belakang Inggris yang merupakan sebuah negara demokratis membuat rakyatnya memiliki kekuasaan penuh pada masa depan yang akan dicapai oleh Inggris. Hal ini dibuktikan oleh dilakukannya referendum untuk menentukan apakah Inggris akan tetap bergabung dengan Uni Eropa atau memilih keluar. Referendum yang telah dilakukan ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris harus melepaskan keanggotaannya dari Uni Eropa, dengan perolehan suara sebanyak 52% rakyat Inggris menginginkan untuk keluar dari Uni Eropa, dan sebanyak 48% rakyat Inggris memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa (TIDORE, 2017). Berdasarkan sejarah, Inggris juga pernah melakukan referendum pada tahun 1975 untuk menentukan apakah Inggris akan tetap bergabung dengan organisasi MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau tidak. MEE sendiri merupakan cikal bakal dari terbentuknya organisasi yang sekarang disebut dengan Uni Eropa. Namun, pada saat itu referendum yang dilakukan dimenangkan oleh para pendukung yang menginginkan agar Inggris tetap bergabung dengan MEE (Hartanto, 2016).

Keputusan masyarakat Inggris yang memilih keluar dari Uni Eropa dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpercayaan mereka terhadap Uni Eropa, di mana Uni Eropa dinilai telah melanggar kedaulatan Inggris dalam beberapa aspek, mulai dari upah pekerja-pekerja industri, keamanan, imigran, hingga kebijakan luar negeri. Kebijakan-kebijakan seperti itu seharusnya menjadi wewenang penuh pemerintahan Inggris demi menjalankan kedaulatan negaranya. Uni Eropa dinilai terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Uni Eropa juga sering kali memaksakan kebijakannya untuk diterapkan, walaupun kebijakan yang dipaksakan Uni Eropa ini bertentangan dengan kepentingan

nasional Inggris. Selain itu, alasan kuat masyarakat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa adalah karena pengungsi. Hal ini terjadi karena masyarakat Inggris menganggap bahwa pengungsi merupakan sebuah ancaman bagi warga lokal Inggris apabila pengungsi terus berdatangan ke tanah mereka (Saviar, 2017). Para imigran yang sudah lama tinggal di Inggris telah mendapatkan beberapa hak selayaknya warga negara Inggris. Namun, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Inggris akhirnya dapat membatasi siapa saja yang dapat masuk ke Inggris dan yang berhak mendapatkan hak tinggal dan *benefit* yang diberikan. Dan hal tersebut kemudian akan mengancam para imigran yang tidak memenuhi persyaratan yang diberi oleh Inggris.

Migrasi di Inggris mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 yaitu sebanyak 630.000 imigran asing datang ke Inggris baik dari dalam maupun luar Uni Eropa (Perlman, 2017). Populasi masyarakat Inggris telah mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya berjumlah sekitar 57 juta pada tahun 1990 menjadi 65 juta pada tahun 2015, dan 333.000 tambahan tiba di Inggris pada tahun 2016 (Frum, 2016). Hal ini membuat meningkatnya beban ekonomi untuk membiayai para pengungsi tersebut mulai dari menyediakan pelayanan publik, makanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Krisis pengungsi juga berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya pengeluaran negara dalam pelatihan bahasa nasional dan pelatihan lainnya.

Pada awalnya, Inggris bergabung dengan Uni Eropa dengan harapan untuk meningkatkan perekonomiannya pasca Perang Dunia II. Inggris menyadari bahwa dirinya membutuhkan Eropa dalam pemulihan ekonominya setelah kehancurannya dalam Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi Inggris mengenai modernisasi dalam bidang infrastruktur dan industri, serta penggunaan teknologi modern yang kemudian membuat Inggris bergabung dalam pusan arus pasar bersama Eropa sebagai langkah penting untuk lebih melangkah ke arah integrasi *Eropa Free Trade Area (EFTA)* dan *European Economic Community (EEC)* (Wiyanti, 2018).

Berbagai dorongan terus dialami Inggris dengan Uni Eropa mengenai kebijakan dan lain sebagainya. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan sikap ragu-ragu masyarakat Inggris menyebar luas, dan kemudian menjadi dukungan mayoritas masyarakat Inggris terhadap Brexit. Inggris yang merupakan pencetus revolusi industri pada tahun 1870 menunjukkan bahwa Inggris merupakan negara yang memiliki perekonomian modern. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan harapan agar secara politik lebih otonom dan lebih bebas mengembangkan ekonominya. Namun demikian, keluarnya Inggris dari Uni Eropa tentu saja akan mempengaruhi perekonomiannya.

Pada tahun 2016-2020 Inggris dan Uni Eropa terus melakukan pembahasan mengenai Kerjasama. Terutama dalam bidang perekonomian khususnya pada perdagangan mengenai peraturan non-tarif. Dari tahun 2016-2020 yang merupakan jangka pendek dari referendum Brexit merugikan bagi Inggris. Karena dari berbagai sector mulai dari perdagangan, nilai tukar mata uang, investasi, keuangan, Jenis pekerja, dan lain sebagainya, Inggris mengalami penurunan jika dibandingkan saat Inggris masih Bergabung dengan Uni Eropa. Untuk jangka Panjang Inggris mungkin akan mengalami peningkatan Ekonomi, karena Inggris dapat membuat sebuah regulasi yang dibutuhkan negaranya sendiri demi menciptakan negara yang sejahtera ekonominya tanpa adanya keterikatan antara Institusi atau organisasi yang ada. Namun, hal ini balik pada kiprah Inggris untuk merogoh kesempatan negosiasi sebaik mungkin dengan Uni Eropa dan negara-negara lain meskipun secara potensi Inggris mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyebarkan perekonomiannya meskipun sudah tidak bergabung dengan Uni Eropa. Karena Inggris sendiri merupakan negara besar yang memiliki kekuatan daya tarik sendiri.

Brexit Timeline

Pada Tahun	Proses
Feb 2016	Perdana Menteri David Cameron mengatakan bahwa Inggris akan mengadakan Referendum
Juni 2016	Pemerintah Inggris melakukan vote mengenai Brexit
Juli 2016	Theresa May diangkat sebagai PM
2017	Pembahasan artikel 50 Uni Eropa
Juli 2018	Chequers Plan
Nov 2018	Uni Eropa menyetujui negosiasi
Des 2018	Theresa May memenangkan 200 votes
Jan 2019	Komentar The House of Commons terkait Brexit
Mar 2019	Batas akhir diskusi ke 2 Brexit
Juli 2019	Boris Johnson sebagai PM
Jan 2020	Batas akhir diskusi ke 3 Brexit
Des 2020	Pembahasan mengenai masalah kerja sama

DAFTAR TABEL 1 - BREXIT TIMELINE

(Donghyun Park, 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah;”Bagaimana dampak dari Brexit terhadap perekonomian Inggris”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh Inggris setelah keluarnya dari keanggotaan Uni Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep National Interest

Dalam kepentingan nasional, negara memiliki peran sebagai aktor untuk memainkan peranan dalam mengambil keputusan dan pergaulan internasional yang bermanfaat bagi negara itu sendiri. Konsep ini penting sebagai landasan dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional (Rachman, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, 2018). Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga (Oktaviani, n.d.). Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan Nasional sering dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan tiap negara sebelum menetapkan dan merumuskan suatu sikap atau Tindakan bagi negaranya. Bahkan dalam kebijakan luar negeri setiap negara selalu dilandasi akan kepentingan nasional yang sudah ditetapkan demi negaranya (Oppenheim, 1987).

Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional dibagi menjadi 4 poin yang biasa disebut sebagai kepentingan dasar tiap negara, yaitu (Pammasena, 2017) :

- *Defense of Defense of Homeland* (Kepentingan Keamanan); kepentingan pertahanan yaitu kewajiban setiap negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam.
- *Economic Well-being* (Kepentingan Ekonomi); kepentingan ekonomi ialah hubungan perdagangan dengan negara lain yang lebih

mendapatkan keuntungan lebih diutamakan atau lebih mendapatkan nilai ekonominya.

- *Favorable World Order* (Kepentingan Tata Dunia); kepentingan tata dunia yaitu jaminan akan pemeliharaan system politik dan ekonomi internasional diaman negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha yang melintasi tiap negara dapat beroperasi dengan aman.
- *Promotion of Values* (Kepentingan Ideologi); kepentingan ideologi adalah kepentingan akan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dari suatu negara.

Nuechterlein juga merumuskan intensitas kepentingan kedalam 4 kategori besar, yaitu; *survival*, *vital*, *major*, dan *peripheral*. Tingkat pertama yaitu *survival* yang merupakan faktor penting dari suatu negara. *Survival* adalah suatu hal yang sudah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Hal ini dikarenakan menyangkut negara yang akan rela berperang demi kepentingannya. *Survival* sendiri merupakan kepentingan mendasar karena jika suatu negara tidak dapat bertahan hidup maka negara tersebut akan runtuh dan tidak ada lagi kepentingan-kepentingan lain di dalamnya (Nuechterlein, 1976). Tingkat kedua yaitu *vital* atau berbahaya. Dalam hal ini, intensitas berbahaya ialah suatu keadaan yang dianggap membahayakan negaranya dan dapat ditanggulangi dengan berbagai tindakan, baik itu harus menggunakan militer ataupun tidak.

Tingkat ketiga yaitu *major* atau serius. Ketika suatu situasi berkembang yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap ekonomi, politik, dan sosial maupun ideologi. Untuk mengatasi masalah ini negara dapat melakukan negosiasi, namun jika negosiasi gagal dan memerlukan bantuan militer, maka tingkatnya akan naik menjadi berbahaya bukan lagi serius. Tingkat terakhir adalah *peripheral* atau mengganggu. Dalam intensitas ini, ketika lingkup nasional tidak terganggu oleh lingkup internasional, namun perusahaan yang berada diluar negeri terancam.

Multinational corporation (MNC) merupakan salah satu contohnya. MNC yang besar memiliki pengaruh yang besar di dalam perekonomian negara.

Jika dilihat dari sudut pandang *National Interest*, keluarnya Inggris dari Uni Eropa dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, Inggris tidak mau keamanan dan kedaulatannya di intervensi oleh Uni Eropa dan Inggris ingin mengurangi atau ingin menanggulangi para imigran sendiri tanpa campur tangan dari Uni Eropa. Masyarakat Inggris mengambil keputusan dengan keluar dari Uni Eropa dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang ada mulai dari imigran dan merdeka tanpa campur tangan suatu organisasi dalam tata negaranya, kerja sama perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat Inggris diharapkan Inggris mampu menjadi negara yang *super power* dan dapat meningkatkan perekonomiannya dengan lebih pesat dibandingkan sebelumnya.

2. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi Liberal adalah ekonomi pasar yang memiliki kebebasan untuk melakukan langkah-langkah aktivitas ekonomi pada pelaku-pelaku ekonomi saat bertransaksi. Dalam sistem ekonomi Liberal, campur tangan pemerintah hampir tidak ada, kecuali hanya menjadi kontrol untuk terlaksananya hubungan ekonomi. (Bhudianto, 2012) Semua orang diberi kebebasan untuk menentukan usahanya. Masyarakat bebas merogoh keuntungan, bebas menentukan pekerjaan, & lain sebagainya. Namun, kemampuan untuk bersaing sangat menentukan. Bagi rakyat yang tidak mampu bersaing akan selalu tertindas lantaran bisa dieksploitasi oleh mereka yang memiliki power, baik menurut segi modal, modal dan pengetahuan. (Caniago, 2020)

System ekonomi Liberal merupakan suatu system ekonomi dimana seluruh kegiatan perekonomiannya mulai dari distribusi, produksi, dan konsumsi dipegang sepenuhnya oleh pasar. System ekonomi Liberal ini juga menghendaki adanya kebebasan Individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang berarti setiap

individu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di dalam perdagangan. Sistem ekonomi Liberal merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. (Supriyanto)

System ekonomi Liberalis didasarkan dari sistem ekonomi kapitalisme yang mengandalkan secara penuh perputaran roda ekonomi melalui prosedur pasar bebas dan perpindahan modal secara bebas baik didalam negeri maupun antarnegara(pasar global) Tetapi, dalam kenyataannya pada negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, & sebagian Asia yang memiliki label kapitalis, tidaklah sepenuhnya menerapkan perekonomian menggunakan prosedur pasar bebas lantaran terdapat donasi pemerintah pada bentuk subsidi, tunjangan, & fasilitas sosial bagi warga golongan menengah ke bawah, melindungi industri atau produk lokal berdasarkan persaingan menggunakan produk-produk impor. Pemerintah juga menguasai saham seluruhnya atau sebagian berdasarkan saham perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat. (Bhudianto, 2012)

Ekonomi Liberal memiliki beberapa ciri-ciri antara lain ;

- Menerapkan system persaingan bebas
 - Pengakuan hak individu
 - Setiap individu bebas untuk memiliki barang dan alat-alat produksi
 - Modal berperan sangat penting
 - Pemerintah memiliki peran yang dibatasi terhadap perdagangan bebas
 - Kepentingan mencari laba didasari atas kepentingan diri sendiri.
- (Ismail, 2020)

System Ekonomi Liberal bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap para penggiat usaha dalam bersaing dan berinovasi secara bebas. System ekonomi bebas juga dapat menentukan harganya sendiri dari para produsen. Namun hal ini

harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di masing-masing negara. Disini pihak pemerintah hanya sebagai penjaga dan pengatur didalam mekanisme di dalam pasar bebas. (Ismail, 2020)

Dalam system ekonomi Liberal, pemerintah memiliki beberapa peran. Mulai dari melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap kebijakan anggaran misalnya dalam hal penghapusan masalah subsidi, selanjutnya ialah Liberalisasi dalam sector keuangan negara dan Liberalisasi dalam sector perdagangan agar terciptanya arus pasar yang bebas. Berbicara mengenai system ekonomi Liberal tentunya tidak luput dari keuntungan dan kerugian berikut beberapa keuntungan dan kerugian dari system ekonomi Liberal;

Berikut beberapa Keuntungan dalam system ekonomi Liberal;

- A. Produksi barang berdasarkan didasarkan terhadap kebutuhan pasar yang bearti setiap pemain dalam pasar bebas tidak akan membuat barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Produk yang akan beredar dipasar ditentukan berdasarkan apa yang dibutuhkan para pembeli pada saat itu.
- B. Hadirnya produk-produk berkualitas. Dengan adanya produk-produk yang berkualitas diharapkan akan meningkatkan persaingan produk pasar. Dimana para produsen akan berlomba-lomba untuk membuat produk terbaik demi membuat para pembelinya tertarik dan berminat membeli produk mereka. Dengan produk yang berkualitas tinggi diharapkan mampu menarik minat para konsumen.
- C. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi para pelaku usaha. Tentunya dengan adanya persaingan yang tinggi dari para pemilik bisnis akan berusaha keras dalam pembuatan kreativitas dan inovasinya pada menciptakan produk terbaik . Hal tadi bertujuan supaya produk yang mereka ciptakan tidak sama dengan produk produsen lain dan memiliki nilai tambah yang lebih berkualitas dibanding produk lain. (Ismail, 2020)

Berikut merupakan Kerugian dalam system ekonomi Liberal;

- A. Adanya kesenjangan perekonomian di masyarakat. Kesenjangan yang terjadi pada pada sistem ekonomi Liberal yaitu, istilah semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Hal tersebut terjadi lantaran pembuat memahami apa yang diperlukan sang rakyat dan produk apa yang seharusnya mereka produksi. Dengan begitu, para pembuat tentu akan semakin kaya. Terlebih buat pembuat yang telah terkenal, mereka akan semakin maju dan membuat para pedagang baru sebagagian mengalami kesulitan pada menarik minat pasar. sehingga dapat menyebabkan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.
- B. Adanya eksploitasi Sumber daya manusia yang berlebihan. Pada saat masyarakat membutuhkan produk tertentu, maka akan ada banyak produsen yang memproduksi barang tersebut secara bersamaan dan besar-besaran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
- C. Terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Dengan adanya persaingan pasar yang sangat luas, membuat para pelaku pasar bebas membuat mereka berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat para pemilik usaha akan melakukan segala cara untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar (Azizah, Sistem Ekonomi Liberal: Pengertian, Ciri, Tujuan & Dampaknya, 2020).

Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa otomatis Kerjasama yang sempat terjalin didalam organisasi Uni Eropa tidak dapat lagi dirasakan Inggris. yang membuat Inggris akan membuat peraturan Kerjasama terbaru dengan Uni Eropa. dengan membuat Kerjasama terbaru khususnya di perdagangan tentunya Inggris akan berpegang teguh kepada kepentingan masyarakatnya dan kepentingan negerinya. Begitu juga dengan Uni Eropa yang juga tidak mau rugi dalam hal Kerjasama dengan Inggris. Uni Eropa juga tentunya akan memikirkan para anggota – anggotanya.

Kerjasama yang akan terjalin antara Uni Eropa dan Inggris tentu tidak akan dapat dilakukan dengan mudah. Tentunya pasti banyak hambatan yang akan terjadi antara Inggris dan Uni Eropa dalam melakukan Kerjasama. Diharapkan dengan adanya kesepakatan Bersama dalam melakukan Kerjasama ekonomi terutama dalam bidang perdagangan yang tidak merugikan satu sama lain. Pemerintahan Inggris dan Uni Eropa harus bekerja keras demi terciptanya hubungan yang harmonis seperti saat Inggris masih bergabung di Uni Eropa.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis mengenai fenomena Brexit yaitu perekonomian Inggris yang mengalami penurunan pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, hal ini terjadi karena Inggris belum berhasil menata hubungan ekonomi baru secara bilateral (di luar kerangka regional UE) dengan negara-negara yang anggota Uni Eropa maupun dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan skripsi ini dari awal Brexit hingga apa yang akan terjadi pada perekonomian Inggris after Brexit. Topik yang penulis bahas sendiri mengenai perekonomian Inggris pasca Brexit.

G. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap teks dari berbagai sumber data sekunder yang valid dan reliabel, berupa buku teks, artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen lain yang relevan. Data yang dianalisis adalah kondisi perekonomian Inggris sewaktu masih bergabung dengan Uni Eropa dan sesudah melepaskan diri dari Uni Eropa. Kemudian, keadaan sebelum dan sesudah tersebut dianalisis untuk membuktikan

hipotesis bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa memang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Inggris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi 5 bab yaitu;

BAB 1: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: Bab ini berisi tentang sejarah Uni Eropa dan bergabungnya Inggris ke Uni Eropa.

BAB 3: Bab ini akan membahas mengenai proses British Exit (Brexit).

BAB 4: Bab merupakan inti jawaban terhadap rumusan masalah yakni apa dampak Brexit terhadap perekonomian Inggris.

BAB 5: Bab ini merupakan kesimpulan dan penutup.